

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai upaya dan antisipasi terhadap keadaan masyarakat dengan memandang bahwa alim ulama adalah sebagai tenaga pendidik yang besar pengaruhnya dikalangan masyarakat perlu diorganisir secara baik. Dan juga karena mengindahkan hasil usaha dari Residen 11 Galuh, Resimen 10 Priangan Barat dan Resimen 8 Bandung tentang Penanganan Keamanan dan Kerjasama Alim Ulama dan Umaro. Maka diperlukan keseragaman bentuk Majelis Ulama itu sebagai sebuah gerakan. Majelis Ulama ini dibentuk berdasarkan Instruksi Penguasa Perang Daerah Swatantra I Jawa Barat Nomor Instruksi 32/8/P.P.D./1958, tertanggal 11 Agustus 1958, sebagai kelanjutan pembentukannya pada 12 Juli 1958. Lembaga yang berasaskan Islam ini bertujuan untuk “melaksanakan kerja sama dengan alat Negara Republik Indonesia dalam bidang tugasnya yang sesuai dengan ajaran Islam”.¹

Meski Majelis Ulama dibentuk berdasarkan penetapan Penguasa Perang Daerah (Paperda) Swatantra Tingkat I Jawa Barat, namun itu dapat dipandang merupakan sisi formal-legalistik saja, karena mendahului pembentukannya itu, para ulama sendiri selalu mengadakan berbagai pertemuan. Salah satu tempat yang kerap yang dijadikan tempat pertemuan adalah Pondok Pesantren Sindangsari (sekarang al-Jawami) di Cileunyi Bandung pimpinan K.H. R Sudja'i. Pertemuan-pertemuan tersebut membahas berbagai kondisi pergolakan daerah dan perkembangan negara saat itu, karena merasa khawatir dengan kenyataan bahwa akar-akar

¹ MUI Dalam Dinamika Sejarah (BMAU ke MUI di Jawa Barat), Bandung: Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Barat, 2007, hal. 34.

keagamaan tidak ditopang aturan perundang-undangan dan didukung oleh kebijakan politik pemerintah. Para ulama pun ingin merumuskan langkah-langkah yang didasari semangat perjuangan dan pengabdian untuk mempertahankan kelangsungan dakwah dan *amar ma'ruf nahyi munkar* sekaligus menjaga keamanan demi keutuhan NKRI lewat jalur *ishlah bainan naas* (perdamaian antar sesama manusia).²

Sebagai peningkatan dan lebih mengokohkan posisi Majelis Ulama, diselenggarakanlah Konferensi Alim Ulama-Umaro pada 7-9 Oktober 1958 yang bertepatan dengan 2-4 Rabi'ul Tsani 1377 H di Lembang Bandung, dengan sebuah Panitia Penyelenggara yang dipimpin Let.Kol. Omon Abdurachman sebagai Ketua Umum, seorang Perwira TT III/Siliwangi. Konferensi ini diselenggarakan untuk mengokohkan kebersamaan dalam menegakan NKRI. Para tokoh ulama pula lah yang kemudian terlibat dalam Konferensi Alim Ulama-Umaro Daerah Swatantra I Jawa Barat di Lembang, konferensi tersebut menghasilkan keputusan yang berkaitan dengan tiga persoalan pokok yang dihadapi saat itu, yakni: (a) usaha menyempurnakan pemulihan keamanan dan pemeliharaan, (b) usaha menyempurnakan pembangunan dan (c) usaha penyempurnaan pendidikan dan kebudayaan. Keputusan konferensi ini disampaikan antara lain pada Presiden Republik Indonesia, Ir. Soekarno, para Menteri dan KSAD.³

Pemaparan singkat mengenai Majelis Ulama diatas membuat penulis merasa tertarik, dikarenakan berbagai hal, *pertama* adalah di dalam MUI Jawa Barat dalam struktur kepengurusannya ada beberapa anggota yang berlatar belakang militer. *kedua* dalam pemilihan tahun, penulis memilih satu periode awal kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat yaitu tahun 1958-1967 karena di deretan tahun ini yang penulis ketahui dari catatan-catatan sejarah adalah Indonesia sedang berada dalam kondisi yang kurang baik dengan berbagai

² *Ibid.*, hal. 36.

³ *Ibid.*, hal. 37-38.

permasalahan di dalamnya. Seperti peristiwa yang terjadi pada tahun 1959, Presiden Soekarno membubarkan Konstituante dan menetapkan UUD 1945 berlaku kembali, penetapan Dekrti ini pada tanggal 5 Juli 1959.⁴ Kemudian pada tahun 1965 merupakan puncak sebuah Gerakan 30 September yang menurut Ricklefs dalam karyanya bahwa pemberontak mengumumkan bahwa gerakan 30 September adalah suatu kelompok militer yang telah bertindak untuk melindungi dari suatu kudeta yang di rencanakan.⁵ Maka dari itu Presiden Sukarno menyampaikan pidatonya kepada seluruh rakyat Indonesia yang berhubungan dengan Gerakan 30 September 1965, yang intinya memaparkan mengenai ketidak benaran informasi yang beredar.⁶

Dalam karya tulis ini penulis mencoba menguraikan latar belakang Majelis Ulama Jawa Barat yang anggotanya adalah berbasis militer selain itu latar belakang kondisi Jawa Barat pada saat itu. Selain militer peran masyarakat sipil juga berpengaruh dalam berdirinya lembaga ini. Pemaparan diatas membuat penulis memfokuskan penelitian ini dengan judul **Majelis Ulama Jawa Barat 1958-1967**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Profil Majelis Ulama Jawa Barat 1958-1967?
2. Bagaimana Keterlibatan Militer dalam Majelis Ulama Jawa Barat 1958-1967?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Profil Majelis Ulama Jawa Barat 1957-1967.
2. Untuk Mengetahui Majelis Ulama Jawa Barat 1958-1967.

D. Kajian Pustaka

⁴ Daftar Arsip Pidato Presiden RI Nomor: 083 Tanggal 07/05/59. Dekrit Presiden RI/Panglima Tertinggi tantang Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945.

⁵ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), hal. 428

⁶ Daftar Arsip Pidato Presiden RI Nomor: 815 Tanggal 10/03/65. Bersisi tentang Amanat PJM Presiden Sukarno Kepada Seluruh Rakyat Indonesia Berhubung dengan Peristiwa Gerakan 30 September 1965. Di Siarkan lewat RRI pada tanggal 3 Oktober 1965.

Penelitian-penelitian mengenai hal yang sejenis telah dilakukan akan tetapi dalam hal tertentu menunjukkan perbedaannya. Berikut ini adalah penelitian-penelitian yang dapat penulis dokumentasikan sebagai kajian pustaka.

1. *MUI Dalam Dinamika Sejarah (BMAU ke MUI di Jawa Barat)*, Edisi Kedua, Bandung: Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Barat, 2007. Dalam buku ini dibahas mengenai peran perjuangan para ulama dari mulai pencapaian, pengisian dan mempertahankan kemerdekaan hingga membangun manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, berakhlakul karimah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan Negara sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia Jawa barat menjadi pelopor pembantukan Majelis Ulama Indonesia Pusat, yang pada dasarnya merupakan kepeloporan alim ulama khususnya dari pondok pesantren dan umaro yang peduli terhadap perkembangan umat dan negara ini. Di dalam buku ini juga di bahas mengenai struktur kepengurusan atau para ulama pelopor yang menjadi inisiator pembentukan MUI Jawa Barat dengan kondisi Jawa Barat pada saat itu.
2. H.M. Musthafa As dkk, *Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat dari Masa ke Masa*, (Bandung: Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat, 1998). Dalam buku ini membahas mengenai Perjalanan Majelis Ulama Jawa Barat sejak awal berdiri, kemudian dibahas pula mengenai para tokoh pendiri Majelis Ulama. Dibahas pula mengenai berbagai kerjasama yang dilakukan Majelis Ulama dengan lembaga-lembaga negara. Seperti kerjasama dalam bidang pendidikan, sosial dan budaya. Dalam buku ini juga terdapat lampiran-lampiran surat keterangan atau SK yang dikeluarkan baik oleh Penguasa Perang atau oleh MUI pada waktu itu tentang berbagai macam program baru yang akan dilaksanakan. Isi Piagam Majelis Ulama Indonesia pun terdapat di dalam buku ini.

3. Dr. Nina H. Lubis dkk, *Sejarah Perkembangan Islam di Jawa Barat*, (Bandung: Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2011). Dalam buku ini membahas mengenai bagaimana Islam masuk dan berkembang sejak awal kedatangannya. Pembahasan di buku ini mengenai Penyebaran Islam di Jawa Barat, kemudian perkembangan pesantren sejak masa awal hingga masa kolonial, sampai perkembangan setelah kemerdekaan, selain itu juga dalam Jurnal/buku ini di bahas mengenai riwayat Kiai terkemuka dan perkembangan Tarekat di Tatar Sunda baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan Indonesia. dalam jurnal ini pun terdapat pembahasan mengenai Naskah Islam dan peninggalan arkeologis di Jawa Barat. dan pembahasan terakhir dari jurnal ni adalah mengenai organisasi massa, lembaga pendidikan dan tasawuf modern, sejak organisasi masa kolonial sampai masa Republik Indonesia. berbeda dengan karya ilmiah yang saya kerjakan dikarenakan dalam jurnal ini di bahas secara komprehensif tentang Perkembangan Islam di Jawa Barat adapun pembahasan yang mengenai MUI Jabar di bahas secara singkat.

Adapun pembahasan yang akan dibahas oleh penulis dalam tulisan ini adalah mengenai Keterlibatan Militer di dalam MUI Jawa Barat 1958-1967. Karena latar belakang konflik di Jawa Barat pada masa itu yang membuat kerjasama antara Militer dan Ulama terjalin erat. Di awal pembahasannya mengenai profil MUI Jawa Barat dari tahun 1958-1967, kemudian di bahas pula keberadaan atau keterlibatan militer di kepengurusan MUI Jawa Barat. Yang membedakan tulisan ini dengan karya-karya yang sebelumnya ada adalah fokus penulis yang hanya membahas di awal periode MUI Jawa Barat yang masih banyak anggotanya yang berbasis oleh militer khususnya TNI AD.

E. Langkah-langkah Penelitian

Metodologi merupakan ilmu yang membicarakan tentang cara atau proses untuk mengkaji sebuah penelitian. Menurut Louis Gottchalk bahwa metode sejarah merupakan proses menguji dan menganalisis kesaksian sejarah guna menemukan data yang otentik dan dapat dipercaya, serta usaha sintesisnya atas data semacam itu menjadi sebuah kisah sejarah yang dapat dipercaya keotentikannya.⁷

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yang lazim digunakan oleh para sejarawan yaitu *Heuristik*, *Kritik*, *Interpretasi*, dan *Historiografi*. Louis Gottchalk dalam bukunya *Mengerti Sejarah* menjelaskan bahwa metode sejarah adalah “Proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau, dari pengumpulan data hingga penulisan”.⁸

a. Heuristik

Dalam tahapan Heuristik seorang sejarawan atau seorang penulis harus mampu menggambarkan cara kerja, usaha, atau upaya-upaya yang dilakukan dalam pengumpulan atau menghimpun sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan sebuah penelitian. Suatu penelitian yang bertujuan untuk suatu penulisan pasti memerlukan sumber atau data-data informasi yang akan menunjang sebuah penelitian, karena penelitian sejarah harus menggunakan sumber-sumber, baik itu sumber tertulis, sumber lisan ataupun sumber benda. Untuk mendukung suatu kebenaran atau fakta dalam suatu penelitian.⁹

Penulis mencari bahan-bahan atau sumber-sumber yang dianggap relevan untuk digunakan dalam sebuah penelitian. Adapun sumber sejarah yang diperoleh hasil penelitian

⁷ Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 44.

⁸ Louis Gottchalk, *Mengerti Sejarah*, Terjemahan Nugroho Notokusanto, (Jakarta: Universitas Indonesia Pres, 1985), hal. 32

⁹ Kuntowidjoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Benteng, 2005), hal. 95-98.

dari perpustakaan-perpustakaan berupa buku-buku seperti Perpustakaan Kampus UIN Bandung, Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Jawa Barat, Perpustakaan Dinas Sejarah Angkatan Darat, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Jakarta, Perpustakaan Batu Api Jatinangor, maupun buku-buku yang dimiliki oleh penulis sendiri. Data-data dan hasil wawancara kepada Pengurus atau Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat.

Adapun sumber-sumber yang didapatkan selama penelusuran tersebut diantaranya adalah:

1) Sumber Primer

(a) Sumber Lisan

Wawancara bersama Dr. KH. A. Syamsuri Siddiq, SH.,M.H (93 Tahun). Anggota Dewan Pertimbangan MUI Jawa Barat. Beliau adalah anggota Konferensi Alim Ulama-Umaro pada 7-9 Oktober 1958 di Lembang, Bandung. Wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018, Pukul 10.10 WIB.

(b) Sumber Tulisan

1. Daftar Lampiran Penetapan Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat, Nomor: 53/8/PPD/58, Tanggal 22 Agustus 1958 Perihal: Pengangkatan Pimpinan Ulama Daswati I Jawa Barat.
2. Instruksi Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat, Nomor: Instr./29/7/PPD/1958 Perihal: Pendidikan Kerohanian
3. Instruksi Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat, Nomor: 45/12/P.P.D/52 Perihal: Bimbingan Kerohanian terhadap Buruh-buruh di Perusahaan Perindustrian dan Perusahaan Perkebunan.

4. Anjuran Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat, Nomor: 3045/Um/PPD/58 Perihal: Tempat Ibadah pada Jawatan Kantor Pemerintah/Partikelir.
5. Daftar Arsip Pidato Presiden RI Nomor: 083 Tanggal 07/05/59. Dekrit Presiden RI/Panglima Tertinggi tantang Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945.
6. Daftar Arsip Pidato Presiden RI Nomor: 815 Tanggal 10/03/65. Bersisi tentang Amanat PJM Presiden Sukarno Kepada Seluruh Rakyat Indonesia Berhubung dengan Peristiwa Gerakan 30 September 1965. Di Siarkan lewat RRI pada tanggal 3 Oktober 1965.

2) Sumber Sekunder

(a) Sumber Lisan

1. Wawancara bersama Prof. Dr. KH. Miftah Faridl, (74 Tahun) Ketua Dewan Pertimbangan MUI Jawa Barat sekaligus juga menjabat sebagai Ketua Umum MUI Kota Bandung. Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 3 Mei 2018 pada pukul 15.40 WIB Bertempat di kantor “Safari Suci” Travel Haji dan Umroh di Jl. Taman, No. 11 Citarum, Kota Bandung.
2. Wawancara bersama Drs. H.M. Rafani Akhyar, M.Si. (63 Tahun) Sekretaris Umum MUI Jawa Barat. Wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018, Pukul 13.06 WIB.
3. H. Momon Gumilar, Usia 63 Tahun, beliau adalah Kepala Kesekretariatan MUI Jawa Barat. Wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2018, Pukul 14.35 WIB

4. Wawancara bersama Anggota Tim Fatwa MUI Jawa Barat yang diwakilkan oleh bapak Dr. Dede Rodliana, M.A. Pada hari Rabu, 25 Oktober 2017 di Jl. LL. RE. Martadinata No. 105 Bandung Jawa Barat.

(b) Sumber Buku

1. *MUI Dalam Dinamika Sejarah (BMAU ke MUI di Jawa Barat)*, Edisi Kedua, Bandung: Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Barat, 2007.
2. H.M. Musthafa As dkk, *Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat dari Masa ke Masa*, Bandung: MUI Jawa Barat, 1998.
3. Dr. Nina H. Lubis dkk, *Sejarah Perkembangan Islam di Jawa Barat*, Bandung.
4. Jhon Tosh. *The Pursuit of History. Aim Methods and New Directions In The Study of Modern History*. London and New York: Longman. 1985.
5. Kuntowidjoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang. 2005.
6. Louis Gottchalk. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia Pres. 1985.

(c) Sumber Arsip

1. Ajakan Alim Ulama dan Eksponen Angkatan-45 Kepada Seluruh Warga dan Bangsa
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat
3. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Barat No. 38/ SK / MUI-JB / IV / 2004 tentang Penulisan Buku MUI Jawa Barat Dalam Dinamika Sejarah.

b. Kritik

Tujuan dari kegiatan kritik adalah bahwa setelah sejarawan berhasil mengumpulkan sumber-sumber dalam penelitiannya, ia tidak akan menerima begitu saja apa yang tercantum dan tertulis pada sumber-sumber itu. Langkah selanjutnya ialah harus menyaringnya secara kritis, terutama pada sumber-sumber pertama, agar terjaring fakta yang menjadi pilihannya. Langkah inilah yang disebut kritik sumber, baik kepada bahan materi (Eksternal) sumber maupun terhadap substansi (Isi) sumber.¹⁰ Kritik sumber umumnya terhadap sumber-sumber pertama. Kritik ini menyangkut verifikasi sumber yaitu pengujian mengenai kebenaran atau ketepatan (akurasi) dari sumber itu. Dalam metode sejarah dikenal dengan cara melakukan kritik eksternal dan kritik internal.¹¹

b.1. Kritik Ekstern

Dalam kritik Ekstern dilakukan untuk menentukan sejauh mana otentisitas (Keaslian Sumber). Seorang sejarawan atau seorang peneliti harus mampu untuk mengungkapkan atau mengkritisi otentitas sumber, sumber tersebut palsu atau tidaknya. Kritik Ekstern terhadap aspek luar atau kondisi fisik dari sebuah sumber. Dalam tahapan ini, kita memastikan sumber itu dikehendaki atau tidak dengan cara menentukan keaslian dan keutuhannya.

a) Arsip Primer

- 1) Daftar Lampiran Penetapan Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat, Nomor: 53/8/PPD/58, Tanggal 22 Agustus 1958 Perihal: Pengangkatan Pimpinan Ulama Daswati I Jawa Barat.
- 2) Instruksi Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat, Nomor: Instr./29/7/PPD/1958 Perihal: Pendidikan Kerohanian

¹⁰ Helius Sjamsudin, *Meodologi Sejarah*, Cet. II, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hal. 103.

¹¹ Helius Sjamsudin, *Ibid.*, hal. 103-104.

- 3) Instruksi Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat, Nomor: 45/12/P.P.D/52 Perihal: Bimbingan Kerohanian terhadap Buruh-buruh di Perusahaan Perindustrian dan Perusahaan Perkebunan.
- 4) Anjuran Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat, Nomor: 3045/Um/PPD/58 Perihal: Tempat Ibadah pada Jawatan Kantor Pemerintah/Partikelir.
- 5) Daftar Arsip Pidato Presiden RI Nomor: 083 Tanggal 07/05/59. Dekrit Presiden RI/Panglima Tertinggi tentang Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945.
- 6) Daftar Arsip Pidato Presiden RI Nomor: 815 Tanggal 10/03/65. Bersisi tentang Amanat PJM Presiden Sukarno Kepada Seluruh Rakyat Indonesia Berhubung dengan Peristiwa Gerakan 30 September 1965. Di Siarkan lewat RRI pada tanggal 3 Oktober 1965.

Arsip- arsip tersebut merupakan arsip yang dibuat pada tahun 1958, dimana tahun itu adalah tahun berdirinya MUI Jawa Barat. Surat-surat tersebut dikeluarkan langsung oleh Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat.

Keempat arsip tersebut di buat di Bandung, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, bahan/materi sumber yang dipergunakan merupakan kertas yang dipergunakan merupakan kertas yang biasa digunakan di Indonesia (kertas HVS biasa). Tinta yang digunakan adalah tinta yang biasa digunakan baik dalam mesin ketik maupun tinta printer biasa. Jenis huruf yang digunakan dalam arsip itu adalah jenis huruf SimSun.

Sumber ini merupakan sumber asli karena di peroleh langsung dari Lembaga MUI Jawa Barat, Sumber tersebut dalam keadaan utuh dan masih bisa di baca dengan jelas.

b) Buku Sekunder

Buku-buku yang menjadi sumber sekunder sebagaimana yang tercantum dalam tahap heuristik penulis dijadikan sebagai sumber penunjang mengingat pembahasannya dapat dijadikan sebagai pelengkap pembahasan. Dari sumber tersebut dilihat segi-segi berikut:

Tahun pembuatan buku tersebut jelas di cantumkan, sumber tersebut di terbitkan di Bandung, Jakarta, dan Yogyakarta. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, bahan/materi sumber yang dipergunakan merupakan kertas yang dipergunakan merupakan kertas yang biasa digunakan di Indonesia (kertas HVS biasa). Tinta yang digunakan adalah tinta yang biasa digunakan baik dalam mesin ketik maupun tinta printer biasa. Jenis huruf yang digunakan dalam buku tersebut adalah jenis Times New Roman.

Sumber ini merupakan sumber turunan karena bukan diperoleh dari tangan pertama yang sezaman dengan pelaku dan hidup di zaman itu. Sumber tersebut dalam keadaan utuh karena tidak terdapat kerusakan sama sekali.

Salah satu contoh sumber sekunder yang digunakan penulis adalah buku *MUI Dalam Dinamika Sejarah (BMAU ke MUI di Jawa Barat)*, Edisi Kedua, Bandung: Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Barat, 2007. Buku tersebut merupakan buku yang di terbitkan langsung oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat. Tahun pembuatan buku tersebut jelas di cantumkan yaitu tahun 2007, merupakan buku cetakan kedua, buku itu di buat di Bandung, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, bahan/materi sumber yang digunakan merupakan kertas yang biasa digunakan yaitu kertas HVS karena cetaknya diperbanyak, tinta yang digunakan merupakan tinta biasa pada umumnya hasil print-an, jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman.

Dalam kritik ekstern Sumber Lisan, penulis menganalisis narasumber yang akan di wawancara sebagai layak tidaknya narasumber untuk dimintai keterangannya, kesediaan mereka

untuk memberikan keterangannya, sejauh mana mengenal objek yang akan penulis teliti, dan usia dari narasumber tersebut. Kemudian untuk sumber tertulis, yang berupa buku dan arsip-arsip Lembaga, penulis mengkritisi dan melihat dari segi fisiknya terlebih dahulu, kemudian tanggal pembuatan sumber lainnya. Seperti dalam sumber lisan penulis mewawancarai perwakilandari pengurus MUI Jawa Barat yaitu bapak Dr. Dede Rodliana, M.A.

b.2. Kritik Intern

Setelah diuji keaslian sumber dari segi fisik, selanjutnya adalah menguji isi dari sumber-sumber tersebut, berikut ini pengujian dari beberapa sumber:

1. Daftar Lampiran Penetapan Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat, Nomor: 53/8/PPD/58, Tanggal 22 Agustus 1958 Perihal: Pengangkatan Pimpinan Ulama Daswati I Jawa Barat. sumber ini berisi tentang Susunan Kepengurusan MUI Jawa Barat tahun 1958, dari mulai Dewan Penguasa Perang Daerah Swatantra I Jawa Barat dan Penasehatnya yang jabatannya adalah sebagai Pelindung, kemudian susunan kepemimpinan dari jabatan Ketua Kehormatan, Ketua Umum, Ketua I, II, III, Penulis (Sekretaris) sampai Bendahara.
2. Instruksi Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat, Nomor: Instr./29/7/PPD/1958 Perihal: Pendidikan Kerohanian. Arsip ini berisi tentang Keputusan Seksi Rohani dan Pendidikan staf Peperda Jawa Barat perlu segera dilaksanakan dengan cara penyelenggaraan Pendidikan Kerohanian terutama di Jawatan/Kantor Militer Sipil agar membimbing para petugas Negara supaya memiliki tanggung jawab, berbudi luhur, serta berakhlak tinggi dan pantas menjadi teladan bagi masyarakat.
3. Instruksi Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat, Nomor: 45/12/P.P.D/52 Perihal: Bimbingan Kerohanian terhadap Buruh-buruh di Perusahaan

Perindustrian dan Perusahaan Perkebunan. Arsip ini berisi tentang instruksi kepada semua perusahaan-perusahaan perindustrian dan perkebunan yang berada di wilayah Jawa Barat perlu mengadakan bimbingan kerohanian bagi para pekerjanya secara terus menerus untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab yang besar.

4. Anjuran Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat, Nomor: 3045/Um/PPD/58 Perihal: Tempat Ibadah pada Jawatan Kantor Pemerintah/Partikelir. Arsip ini berisi tentang ajuran untuk menyediakan ruangan khusus untuk beribadah (Musholla) untuk keperluan ibadah sholat pada waktu berada di kantor misalnya Dhuhur bagi mereka yang beragama Islam.
5. Daftar Arsip Pidato Presiden RI Nomor: 083 Tanggal 07/05/59. Dekrit Presiden RI/Panglima Tertinggi tentang Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945.
6. Daftar Arsip Pidato Presiden RI Nomor: 815 Tanggal 10/03/65. Bersisi tentang Amanat PJM Presiden Sukarno Kepada Seluruh Rakyat Indonesia Berhubung dengan Peristiwa Gerakan 30 September 1965. Di Siarkan lewat RRI pada tanggal 3 Oktober 1965.

Dari keenam arsip tersebut dapat dijadikan komparasi¹² yang perbandingannya sesuai antara sumber lisan dan sumber tertulisnya serta korborsi¹³ antara satu sumber dengan sumber lainnya yang saling mendukung.

c. Interpretasi

Pada tahapan ini yang pertama-tama dilakukan oleh penulis adalah menentukan jenis pendekatan yang digunakan. Adapun pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan sejarah. Atau dalam metodologi sejarah dikenal dengan sejarah perkembangan, dengan

¹² Membandingkan hasil wawancara dengan sumber tertulis yang diperoleh.

¹³ Saling pendukungan antara sumber.

pendekatan sejarah melihat segi-segi perkembangan dan peristiwa yang dikaji seperti golongan sejarah yang berperan, nilai-nilai yang meningkat hubungan dengan golongan lain dan sebagainya. interpretasi merupakan tahap menafsirkan atau tahap memberi makna kepada fakta-fakta (*facts*) atau bukti-bukti sejarah. hal ini diperlukan karena pada dasarnya bukti-bukti sejarah sebagai saksi (*witness*) realitas di masa lampau hanyalah saksi-saksi bisu belaka.¹⁴

Sulasman Mengungkapkan:

Metodologi adalah ilmu atau kajian yang membahas kerangka pemikiran (*frameworks*) tentang konsep-konsep, cara atau prosedur, yang dimaksudnya untuk menganalisis tentang prinsip dan prosedur, yang akan menuntun, mengarahkan dalam penyelidikan suatu bidang ilmu (dalam bahasan ini adalah ilmu sejarah, yaitu kenyataan tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau, untuk di susun dijadikan cerita sebuah sejarah).¹⁵

Helius Sjamsudin mengatakan:

Penafsiran spiritual atau idealistik ini erat hubungannya dengan jiwa (*spirit, soul*) ide (*cita-cita*) manusia dalam perkembangan sejarah. Filsafat sejarah G.W.F Hegel (1770-1831), misalnya merupakan ungkapan kesadaran diri yang merdeka dalam jiwa manusia. Dengan mengambil contoh sejarah Jerman, orang-orang Jerman sesudah Reformasi diciptakan Tuhan dengan tugas Suci membawakan kemerdekaan kepada kemanusiaan.¹⁶

Dalam penelitian mengenai Keterlibatan Militer di Tubuh MUI Jawa Barat Tahun 1958-1967 ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan cara metode *Observasi* dan *Wawancara* dengan melakukan pengumpulan data dari sumber-sumber yang terdapat di MUI Jawa Barat, baik itu arsip, buku, ataupun pemaparan langsung dari para pengurus atau Staf dari Lembaga MUI.

¹⁴ Daliman, *Metode Penelitian Sejarah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hal. 81.

¹⁵ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal. 73.

¹⁶ Helius Sjamsudin, *Op.Cit.*, hal. 132.

Untuk konteks penelitian Keterlibatan Militer di Tubuh MUI Jawa Barat Tahun 1958-1967 ini secara konsep dari sejarah ini memperkenalkan bagaimana sejarah dan latar belakang di balik dominasi militer di MUI pada awal perkembangannya. Dalam kajian ini menjadi sejarahnya adalah mengenai Dominasi Militer di awal pembantukan MUI apakah sampai sekarang masih berlaku dominasi militer atau tidak.

Dalam penelitian di sekitar wilayah Bandung khususnya di Kantor MUI Jawa Barat penulis akan menginterpretasikan tentang Perkembangan MUI Jawa Barat 1958-1967. Yang kala itu dari mulai tahun berdiri 1957 masih bernama BMAU, serta bagaimana dominasi militer dalam tubuh struktur MUI Jawa Barat. Pada tahapan interpretasi yaitu merangkai kejadian sejumlah fakta menjadi satu keseluruhan yang akan dipertanggungjawabkan serta hasil penelitian ini semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya.

d. Historiografi

Penulisan sejarah (Historiografi) merupakan penyajian, presentasi atau penampilan yang sampai kepada dan dibaca oleh pembaca atau pemerhati sejarah. Ada tiga bentuk teknik dasar tulis-menulis yaitu *deskripsi*, *narasi*, dan *analisis*. Tosh mengungkapkan ketika seorang sejarawan menulis ada dua dorongan utama yang menggerakannya yakni: (1) mencipta ulang (*re-create*) dan (2) menafsirkan (*interpret*) serta menjelaskan (*Explain*). Dorongan pertama menuntutnya membuat deskripsi dan narasi, sedangkan yang kedua menuntutnya membuat analisis.¹⁷

Dalam tahapan ini penulis mencoba menggunakan teknik Deskriptif-Analitik dalam pemaparan hasil penelitian ini. Karena penulis bukan hanya menceritakan sebuah peristiwa yang penulis temukan di lapangan namun juga mencoba menemukan problema atau permasalahan

¹⁷ Jhon Tosh, *The Pursuit of History. Aim Methods and New Directions In The Study of Modern History*, (London and New York: Longman, 1985), hal. 94. Dalam Helius Sjamsudin, *Metodologi Sejarah*, Cet.II (Yogyakarta: Ombak, 2012) hal. 185.

yang terjadi di lapangan, maka dari itu bukan hanya narasi namun juga analitis historis yang menggunakan analisis terhadap Keberadaan Militer di Tubuh MUI Jawa Barat Tahun 1958-1967. Pada tahap penulisan (Historiografi) peneliti menyajikan laporan hasil peneliti di awal hingga akhir, yang meliputi masalah-masalah yang harus dijawab. Penyajian historiografi meliputi (1) pengantar (2) hasil penelitian dan (3) simpulan.¹⁸

Dalam tahapan yang terakhir ini penulis mencoba mengaitkan fakta, data dan hasil interpretasi yang akan penulis susun untuk menjadi tulisan. Adapun rencana sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Langkah-langkah Penelitian.

BAB II Profil MU Jawa Barat Tahun 1958-1967, meliputi Sejarah MUI Jawa Barat, Visi dan Misi MUI Jawa Barat dan Susunan Kepengurusan MUI Jawa Barat tahun 1958-1967.

BAB III Majelis Ulama Jawa Barat Tahun 1958-1967, meliputi Tokoh Pendiri MU Jawa Barat, Program Kerja MUI Jawa Barat tahun 1958-1967 dan Posisi Militer di MUI Jawa Barat tahun 1958-1967.

BAB IV merupakan bab penutup yang terdiri dari: Kesimpulan, Saran, selanjutnya dalam akhir penulisan dilengkapi dengan daftar sumber dan daftar lampiran.

¹⁸ Sugeng Priyadi, *Metode Penelitian Pendidikan Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hal. 79.